

**MATUR BUPATI PURBALINGGA**  
**REKAP LAPORAN ADUAN MASYARAKAT PURBALINGGA**  
**Seluruh OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ) Kabupaten Purbalingga**  
 Status Laporan : **SELESAI**

NO	TGL LAPORAN	LAPORAN	TANGGAPAN	TGL TANGGAPAN
1	Senin, 21 Okt 19 11:24:05	<b>Ujankprasetyo@yahoo.co.id</b> mohon solusinya untuk bantuan jalan desa, dikarenakan tambang pasir liar yang sebenarnya cukup meresahkan. kami mohon untuk ditindak dan di perbaiki. (diteruskan dari <a href="https://laporgub.jatengprov.go.id">https://laporgub.jatengprov.go.id</a> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saudara Ujang Prasetyo terima kasih atas saran dan masukannya untuk bantuan jalan desa, dikarenakan tambang pasir liar yang sebenarnya cukup meresahkan. Dapat kami sampaikan bahwa jalan desa kewenangannya ada di Pemerintah Desa dengan pemeliharaan memakai Dana Desa atau Alokasi Dana Desa setelah ditangani sebaiknya diportal supaya truck tidak bisa masuk, sedangkan Pemerintah Kabupaten kewenangannya jalan Kabupaten</li> </ul>	<b>DPUPR</b> Disposisi : <b>2019-10-21 04:28:13</b> Proses : <b>2019-10-25 06:41:05</b> Selesai : <b>2019-10-25 06:41:13</b>
2	Jum'at, 18 Okt 19 08:05:00	<b>Anonim #1957814</b> Pembuatan surat keterangan usaha SKU kelurahan domisili tidak mau membuat karena usaha di Desa Lain. Kelurahan tempat usaha tidak mau membuat SKU karena yg mengajukan bukan warga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assalamu'alaikum Wr Wb Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya pada proses penerbitan ijin usaha. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan yang baru maka</li> </ul>	<b>DIKOPUKM</b> Disposisi : <b>2019-10-18 01:05:57</b> Proses : <b>2019-10-18 01:50:16</b> Selesai : <b>2019-10-19 06:13:00</b>

		kelurahan. Jenis usaha : kios sepatu sandal Desa sesuai KTP : Desa Padamara, Kec. Padamara, Purbalingga, Jawa Tengah. Desa tempat usaha : Pepedan, Karang Moncol, Purbalingga, Jawa Tengah. Mohon agar bisa dibantu untuk masyarakat yg mandiri dan berkualitas yg di dukung birokrasi yg berkualitas. (diteruskan dari website lapor.go.id)	pendaftaran Ijin Usaha Mikro Kecil dilakukan secara online (OSS).Persyaratan yang harus dipenuhi adalah mempunyai KTP, mempunyai Email dan nomor HP yang aktif serta mengisi formulir secara online. Apabila bapak/ ibu belum mempunyai email atau memerlukan penjelasan lebih lanjut maka kami siap membantu dan memberikan pendampingan.Untuk itu silahkan Bapak/ Ibu datang ke PLUT KUMKM d/a Griya UMKM sebelah selatan Polres Purbalingga. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan Wassalamu ' alaikum.Wr Wb	
3	Kamis, 17 Okt 19 16:03:53	<b>Slamet rifai</b> Salam sejahtera untuk ibu Bupati ,saya di sini kembali mengajukan usul supaya tahun depan di terbitkan peraturan Bupati yang baru mengenai pakaian dinas harian .Supaya biasa menggantikan aturan lama di mana pada hari rabu menggunakan pakaian hitam putih dan di gantikan dengan pakaian batik motif pesona gunung Slamet terutama untuk tenaga pendidik.Karena selama ini banyak yang mengeluh banyak pakain batik tapi akhirnya tidak terpakai karena berkurangnya hari untuk mengenakan pakaian batik.trimksh semoga tahun yang akan datang bisa di	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salam sejahtera, Kami sampaikan terimakasih atas masukan /saran yang telah Saudara sampaikan melalui "Matur Bupati". Untuk saran dan masukan Saudara akan dikaji dengan instansi terkait, mengingat penggunaan Pakaian Dinas Hitam Putih mendasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan</li> </ul>	<b>ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA</b> Disposisi : <b>2019-10-17 09:07:27</b> Proses : <b>2019-10-18 07:22:19</b> Selesai : <b>2019-10-18 07:24:27</b>

		terbitkan aturan pemakaian sragam untuk ASN di Purbalingga yang baru	Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.  Demikian untuk menjadi maklum .	
4	Kamis, 17 Okt 19 11:39:59	<b>Anonim #2015441</b> kantor kecamatan rembang kabupaten purbalingga, tolong di proses pembuatan E-KTP nya di percepat. saya bikin sudah 1 tahun lebih belum jadi. (diteruskan dari lapor.go.id)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bisa diberikan data nama lengkap dan alamat Anda, untuk kami tindaklanjuti. Terima kasih</li> <li>Maaf sebelumnya saudara tidak mencantumkan identitas yang benar (NIK yang di cantumkan adalah 3333333333333333), sehingga tidak bisa dilacak proses EKTP yang bersangkutan. Pelapor tidak ada datanya yang bisa dipertanggungjawabkan</li> </ul>	<b>DINPENDUKCAPIL</b> Disposisi : <b>2019-10-17 04:41:09</b> Proses : <b>2019-10-17 05:26:45</b> Selesai : <b>2019-10-17 07:27:06</b>
5	Kamis, 17 Okt 19 11:26:26	<b>Anonim #2059831</b> Saya berada di RSUD HI purbalingga. Jl. Mayjen sungkono Km 1 purbalingga. Telp : (0281)892222/ 892277. Saya pasien bpjs poli paru. Yg dirujuk di RSUD Harapan Ibu. Purbalingga. Ada 2 pasien poli paru. 1 umum . 1 lagi pake bpjs. Ketika kontrol pasien yg umum langsung ditangani hari itu jg hasil nya. mulai dr Cek darah. Dsb. Namun pasien bpjs malah dikasih surat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assalamualaikum wr wb. Saya dr. Dwi Rahayu, tim manajemen komplain RSUD Harapan Ibu Purbalingga. Mohon informasi atas nama pasien siapa dan tanggal kejadiannya, untuk kami tindak lanjuti. Untuk informasi RSUD Harapan Ibu tidak membedakan pasien bpjs, asuransi dan umum. Minta tolong hubungi kami di nomer 082135691040.</li> </ul>	<b>DINKES</b> Disposisi : <b>2019-10-17 04:27:20</b> Proses : <b>2019-10-17 08:40:19</b> Selesai : <b>2019-10-17 08:41:07</b>

		<p>perintah kontrol lain hari. Tidak hari itu jg dapt hasil. Kenapa bisa kaya gini pelayanan nya. Bpjs dibedakan tidak sekaligus jg? Kalau pasien parah apa jg harus nunggu. Kalau pasien sekarat jg harus nunggu? (diteruskan dari lapor.go.id)</p>	<p>Terimakasih.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assalamu'alaikum wr wb. Saya dr. Dwi Rahayu, Tim Manajemen Komplain RSUD Harapan Ibu Purbalingga. Mohon informasi nama pasien dan tanggal kejadiannya untuk segera kami tindak lanjuti. Untuk informasi kami RSUD Harapan Ibu Purbalingga tidak membedakan pasien BPJS, asuransi, dan umum. Mohon hubungi kami di nomer 082135691040. Terimakasih.</li> <li>Baik, segera kami teruskan kejajaran manajemen RS HI untuk ditindak lanjuti, Terima kasih</li> </ul>	
6	Kamis, 17 Okt 19 09:33:21	<p><b>Anonim #1865869</b></p> <p>Tahun 2012 saya rekam e-ktip di Kecamatan Mrebet, Purbalingga, Jateng (3303080202830002). Tahun 2013 saya membuat Surat Keterangan Pindah ke Kota Bogor, dan mendapat KTP model lama dengan NIK baru (3271010202830018). Bulan Agustus 2017 saya ke Disdukcapil Kota Bogor dan Kecamatan Bogor Selatan dan ditemukan bahwa saya punya NIK ganda. Sesuai rekomendasi petugas, saya diminta membuat kembali Surat Keterangan Pindah. Saya sudah mendapatkan Surat Keterangan Pindah Ulang tersebut. Mengingat banyak yang sudah terdaftar dengan NIK yg baru (KK, NPWP, Bank,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. NIK 3303080202830002 sudah diproses kepindahan dengan No. SKPWNI/3303/12092017/0010 tertanggal 12 September 2017, sehingga NIK tersebut sudah tidak ada dalam data kami.</li> <li>2. Jika pemohon melakukan proses perpindahan yang sesuai dengan prosedur maka tidak mungkin terjadi NIK ganda, karena perpindahan tidak merubah NIK dan NIK 3271 adalah NIK terbitan bogor melalui proses input dan bukan melalui prosedur pindah.</li> </ul>	<p><b>DINPENDUKCAPIL</b></p> <p>Disposisi :  <b>2019-10-17 02:35:09</b></p> <p>Proses :  <b>2019-10-17 05:14:44</b></p> <p>Selesai :  <b>2019-10-17 07:23:37</b></p>

		administrasi PNS) kami bermaksud meminta penghapusan NIK yang lama. Mohon arahan apa yg harus saya lakukan selanjutnya? Saya tidak ingin di-pingpong lagi karena kebijakan e-ktp yg kurang sosialisasi pada tingkat petugas saat itu (tahun 2013) dan banyak kasus serupa yg kami temui via internet. Terima kasih	3. Sesuai peraturan Perundang-Undangan satu penduduk memiliki satu NIK, dan NIK yang saudara peroleh di Kota Bogor tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan karena saudara sudah memiliki NIK dengan Nomor 3303080202830002. Jadi tidak dimungkinkan untuk melakukan penghapusan NIK yang saudara sebut "NIK lama" tersebut.	
7	Kamis, 17 Okt 19 09:18:51	<b>Anonim #2058642</b> SALURAN IRIGASI DI DESA PEKIRINGAN, KARANGMONCOL, PURBALINGGA, JAWA TENGAH RUSAK Yth bapak/ Ibu pejabat yang berwenang berikut saya lampirkan foto kerusakan saluran irigasi yang berada di desa Pekiringan RT 02 RW 05 Karangmoncol Purbalingga Jawa tengah besar harapan saya semoga dapat segera ditinjau dan dilakukan perbaikan dikarenakan kerusakan itu sudah satu bulan lebih dan dibiarkan. Dengan adanya pembiaran tersebut mengakibatkan kerusakan semakin parah dan melebar. Demikian laporan ini saya buat untuk di perhatikan dan dapat dilakukan perbaikan secepatnya. (diteruskan dari lapor.go.id)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terima kasih atas sumbangan masukannya atas kerusakan saluran irigasi yang berada di desa Pekiringan RT 02 RW 05 Karangmoncol Purbalingga dan kami akan menindaklanjuti permasalahan tersebut</li> </ul>	<b>DPUPR</b> Disposisi : <b>2019-10-17 02:19:17</b> Proses : <b>2019-10-25 06:38:09</b> Selesai : <b>2019-10-25 06:38:18</b>
8	Kamis, 17 Okt 19 09:10:57	<b>Sorot Official</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terimakasih atas masukannya,</li> </ul>	<b>DPUPR</b> Disposisi :

		<p>pak @ganjarpranowo jalan di desa sirau kecamatan karangmoncol kab. purbalingga sudah rusak tpi blum ada perbaikan pak , tepatnya di dusun karangwuni .. itu jalan satu2nya jalan alternatif tapi kondisinya sudah rusak parah Kabupaten Purbalingga. (diteruskan dari website lapor.go.id)</p>	<p>terkait dengan jalan rusak di Dusun Karangwuni Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol akan kami tindak lanjuti</p>	<p><b>2019-10-17 02:11:39</b> Proses : <b>2019-10-17 03:30:16</b> Selesai : <b>2019-10-18 06:03:28</b></p>
9	Jum'at, 04 Okt 19 09:30:34	<p><b>Triana Tiastami</b> Assamulaikum,,, untuk Dinas Ketenagakerjaan Kab. Purbalingga saya hendak melapor,, bahwasanya Pt. Jhon Toys Indonesia yg beralamat di Desa Jetis, jl. raya Bojong, Kemangkon Purbalingga telah menunggak pembayaran Gaji untuk bulan januari. sempat di akhir th gaji bulan desember baru dibayarkan pd tgl 28 januari 2019. sampai sekarang beberapa karyawan telah di liburkan kembali karena masalah produksi,, dan tidak ada kejelasan tgl berapa gaji karyawan akan di bayarkan. Mohon untuk segera di tindak lanjuti dari dinas terkait. sekian dan terimakasih. (laporan diteruskan dari website lapor.go.id)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terimakasih atas pertanyaan saudara, Perusahaan baru tersebut memang juga sudah menjadi pemantauan kami. Untuk itu saat ini sedang kami tekankan untuk melakukan pembenahan agar proses produksi lancar sehingga tidak menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Semoga produksi perusahaan tersebut segera lancar.</li> </ul>	<p><b>DINNAKER</b> Disposisi : <b>2019-10-11 00:29:46</b> Proses : <b>2019-10-11 01:28:35</b> Selesai : <b>2019-10-11 01:28:42</b></p>
10	Jum'at, 04 Okt 19 09:22:31	<p><b>Yunus Riansyah</b> Dengan hormat, Bersama dengan ini, kami warga masyarakat Desa Banjaran sudah sangat sabar dalam penantian proses pemindahan TPA Banjaran berdasarkan Laporan Hasil Studi kelayakan TPA Bajaran yang sudah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terimakasih atas pendapat yang telah Anda sampaikan,</li> </ul> <p>Dapat kami sampaikan sebagai berikut:</p>	<p><b>DLH</b> Disposisi : <b>2019-10-11 07:42:42</b> Proses : <b>2019-10-21 02:58:59</b> Selesai : <b>2019-10-21 02:59:05</b></p>

dilakukan oleh Pemda Kab.Purbalinga Tahun 2014. Namun sampai dengan saat ini terbukti masih adanya Pembuangan Sampah di Desa Banjaran yang sangat dekat dengan pemukiman. Sudah sekian Tahun, bahkan bertahun - tahun kami merasakan dampaknya akibat Pembuangan Sampah yang sangat meresahkan banyak warga. Untuk itu kami meminta keikhlasan para pemimpin kami dalam menjalankan proses yang sudah dijanjikan kepada warga masyarakat segera direalisasikan, bukan hanya sekedar lewat lisan tapi dibuktikan realisasinya. Jangan sampai warga masyarakat bergejokal kembali atas janji yang tidak jelas. Kepada Bapak Presiden yang bijak dan Kementerian Lingkungan Hidup, mohon kiranya bisa. memberikan teguran kepada Pejabat dan tindaklanjutnya yang sudah pernah memberikan janji kepada masyarakat, bahwa hal ini adalah pembohongan publik. Dampak dari Sampah yang sangat dekat dengan pemukiman bukanlah hal yang biasa namun sangat luar biasa dampaknya mengganggu aktifitas kehidupan sehari - hari warga masyarakat. sehingga mohon kiranya dapat segera dilakukan pemindahan TPA Banjaran karena tidak pernah dikelola dengan baik, hanya membuang sampah dan memberikan dampak pencemaran baik udara maupun air di desa kami. Hal ini

Sejak tanggal 28 Februari 2018 TPA Banjaran sudah ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga sehingga sudah tidak operasioal.

		<p>sudah sangat tidak sesuai AMDAL dan undang - undang yang berlaku. Kami warga masyarakat Desa Banjaran sangat berterimakasih, Jika memang TPA Banjaran ini segera direalisasikan sesuai Janjinya pada Tahun 2018 akan segera dilakukan pemindahan TPA karena sudah tidak layak lagi dilakukan pembuangan sampah di TPA Banjaran berdasarkan hasil Studi kelayakan yang dimenangkan oleh salah satu pihak ke 3 pada Tahun 2014 atas hasil surveynya dan kesepakatan pemerintah Daerah, jika hasilnya tidak layak maka akan segera dilakukan pemindahan TPA Banjaran ke Tempat yang baru namun saat ini masih tetap dibiarkan bahkan sangat menumpuk tinggi sampah nya (bisa di cek lokasinya). Demikian atas perhatiannya, mohon maklum jika ada kata-kata yang tidak sesuai bisa dilihat data pendukung kami yang akan kami unggah. Hormat kami, an.Warga Masyarakat Desa Banjaran Link Video dibawah ini sebagai bukti karena tidak bisa di unggah : 1. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=IX2xjzFvT3g">https://www.youtube.com/watch?v=IX2xjzFvT3g</a> 2. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=lii-sODNz5Q">https://www.youtube.com/watch?v=lii-sODNz5Q</a> Lingkungan Hidup (laporan diteruskan dari website lapor.go.id)</p>		
11	Jum'at, 04 Okt 19 09:07:28	<p><b>Budi Setiawan</b>  Nama : Budi Setiawan Nip : 19840904201503 1 001 Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kab. Purbalingga Jabatan :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah harus linier antara ijazah dengan tupoksi nya.... Penguji kendaraan bermotor d4 nya transportasi darat</li> </ul>	<p><b>BKPPD</b>  Disposisi :  <b>2019-10-10 14:28:19</b>  Proses :  <b>2019-10-16 05:44:34</b></p>



		<p>Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Nilai Angka Kredit : 110 (sekarang) Pangkat : II c ( Sudah 1 Tahun ) Masa Kerja : 11 Tahun 1. Saya memiliki ijazah S1 teknik informatika, Sudah Terakreditasi. 2. Ijazah ini di miliki sebelum di angkat PNS. ( pada saat jadi CPNS menggunakan ijazah DII PKB ) Sesuai data di atas, dapatkah saya naik pangkat dari II c Ke IIIa menggunakan penyesuaian ijazah S1, dengan cara mengikuti ujian penyesuaian ijazah...? (laporan diteruskan dari website lapor.go.id)</p>		<p>Selesai : <b>2019-10-16 05:44:46</b></p>
12	Rabu, 02 Okt 19 23:34:17	<p><b>Eni wijayanti</b> Assalamua'alaikum Yth bapak/ibu Admin Matur Bupati.. Sy mengeluhkan Pembersihan sampah di kali sebelah kejaksaan negeri purbalingga/gereja katolik bancar memang bersih tampak depan, tapi sayangnya sampah yang tadinya numpuk di kali cuma di umpetin di belakang gereja (lebih tepatnya belakang rumah warga), sebelumnya belum pernah seperti ini, tapi ini sudah kali ke3 sampah hanya ditumpuk di belakang gereja, pernah di tegur warga tapi mereka diam. kenapa tidak di angkut truk sampah sekalian. Kasian warga yg tinggal dekat situ (termasuk rumah saya) kadang bau menyengat yang SEMRIBIT mengganggu aktifitas.. mohon ditindak serius bapak/ibu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terimakasih atas masukan yang telah Anda sampaikan,</li> </ul> <p>Dapat kami sampaikan sebagai berikut:</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, sudah dicek ke lokasi, sampah menumpuk di bantaran sungai belakang gereja. Harap dikordinasikan dengan pemerintah kelurahan setempat. Jika sudah dikumpulkan warga dengan kerja bakti, Dinas Lingkungan Hidup siap mengangkut ke TPA.</p>	<p><b>DLH</b> Disposisi : <b>2019-10-11 00:49:02</b> Proses : <b>2019-10-21 03:00:36</b> Selesai : <b>2019-10-21 03:00:42</b></p>
13	Rabu, 02 Okt 19 15:09:16	<b>Slamet rifai</b>		<b>BKPPD</b>

		<p>Asalamualaikum wr wb ibu bupati tercinta. Sy adalah salah satu penjual batik di purbalingga yang tidak ikut paguyuban batik,dan banyak sekali yang tidak ikut paguyuban batik seperti saya.Saya sebagai rakyat ibu ingin sekali memberikan suara jika mungkin ibu berkenan.kalo bs pembatik di purbalingga di berdayakan dengan di hapusnya pakaian putih pada hari rabu,seperti kebanyakan kabupaten di wilayah jawa tengah.dan sy rasa itu di perbolehkan oleh kemendagri pada balasan surat dr bpk gubernur jawa tengah.kalo bs sabtu jg kembali memakai batik. Untuk hari rabu buat lah motif batik yg di tentukan agar kami membuat motif yg baru dan lakku dinoasaran karena sdh di tentukan motif yg di pake. Kalo kamis dan sabtu mgkin boleh batik bebas.Dan pemesanan batik tidak lah harus anggota paguyuban tp yang penting adalah warga purbalingga atau perusahaan yang ada di purbalingga. Atau mgkin bisa di anggarkan untuk pembelian pakaian sragam setiap SKPD melalui anggaran perubahan dan rekanan nya harus pengusaha dari purbalingga.Demikian semoga bs di tindak lanjuti dengan kebijakan yg lebih lanjut atau mgkin bs di teruskannke bagian organisasi. Trimksh,semoga ibu selalu sehat dan dapat selalu bekerja dengan baik,aamiin</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waalaikumsalam Wr Wb</li> </ul> <p>Terimakasih atas masukan /saran yang telah Saudara sampaikan melalui “Matur Bupati”.</p> <p>Berkaitan dengan saran dan masukan Saudara, bersama ini kami sampaikan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkaitan dengan penggunaan pakaian batik, bahwa berdasar Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2018 tanggal 17 Agustus 2018 tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, ASN di lingkungan Pemerinah Kabupaten Purbalingga telah menerapkan penggunaan pakaian dinas batik dengan jadwal sebagai berikut :</li> <li>1. Penggunaan pakaian batik bagi ASN pada perangkat daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Hari Kamis menggunakan pakaian batik Purbalingga</li> </ul> </li> </ol>	<p>Disposisi :  <b>2019-10-11 07:15:45</b>  Proses :  <b>2019-10-17 03:13:42</b>  Selesai :  <b>2019-10-17 06:30:34</b></p>
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Hari Jum'at setelah berolahraga berganti pakaian menggunakan batik Purbalingga /nasional /bebas</li> </ul> <p>2. Penggunaan pakaian batik bagi ASN pada perangkat daerah yang melaksanakan 6 (Enam) hari kerja yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Hari Kamis menggunakan pakaian batik Purbalingga</li> <li>◦ Hari Jum'at setelah berolahraga berganti pakaian menggunakan batik Purbalingga /nasional / bebas</li> <li>◦ Hari Sabtu menggunakan pakaian batik Purbalingga /nasional /bebas</li> </ul> <p>2. Selain penjadwalan penggunaan pakaian batik tersebut di atas, sebagai kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap Batik setiap peringatan Hari Batik diselenggarakan kegiatan bertema batik. Untuk Tahun 2019 kegiatan/event yang dilaksanakan antara lain :</p> <p>1. Kegiatan Fashion Show</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>bertajuk Lenggak-Lenggok Batik Purbalingga yang diikuti perwakilan seluruh OPD dan BUMD. Kegiatan Fashion Show tersebut akan dilaksanakan pada :</p> <p>Hari /tanggal : Sabtu, 26 Oktober 2019</p> <p>Waktu : pukul 18.30 WIB s /d selesai</p> <p>Tempat : Halaman Depan Usman Janatin Citty Park</p> <p>2. Kegiatan Lomba Desain Motif Batik Purbalingga, dengan ketentuan :</p> <p>1. Tema Pesona Gunung Slamet</p> <p>2. Kategori :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Pelajar SD, SLTP</li> <li>◦ Pelajar SMA</li> <li>◦ Mahasiswa dan Umum</li> </ul> <p>3. Design dituangkan dalam kertas A4 disertai kertas berisi data nama, kaegori, alamat, nomor kontak, deskripsi desain dikirim ke Sekretariat Dekranasda Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga paling lambat</p>	
--	--	--	---	--